

PERLU PENDEWASAAN MASYARAKAT

Cegah Polarisasi Sosial pada Pemilu 2024

YOGYA (KR) - Untuk mencegah menguatnya polarisasi atau pembelahan masyarakat seperti yang terjadi pada Pemilu 2019, bisa dilakukan dengan mendewasakan masyarakat dalam berdemokrasi.

Untuk itu, semua pihak harus mampu menekan potensi polarisasi sosial pada Pemilu 2024, sehingga tidak separah yang terjadi pada Pemilu 2019. Dengan demikian, sekalipun Pemilu 2024 muncul polarisasi, namun tidak sampai memunculkan perpecahan.

"Saya berharap para kader Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dapat mencegah terjadinya polarisasi masyarakat menjelang kontestasi Pemilu 2024 atau tahun politik. Karena selama calon pemimpin negara yang dipilih berjumlah lebih dari satu, fenomena polarisasi tidak akan dapat dihindarkan. Mudah-mudahan polarisasi yang terjadi di 2024 bersifat lebih dewasa dibandingkan polarisasi yang terjadi dalam Pemilu 2019 lalu," kata

Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Alumni (IKAL) Lemhannas Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar sesuai melantik Pengurus DPD IKAL Lemhannas DIY 2022-2027 di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (20/10).

Menurut Agum, rakyat sebagai pemilih menjadi unsur yang sangat penting dalam proses Pemilu. Karena itu, kader Lemhannas memiliki kewajiban moral sebagai komponen bangsa untuk berperan mendewasakan dan memberi edukasi kepada masyarakat dalam berpartisipasi pada proses demokrasi. Tapi setelah kontestasi politik usai, masyarakat harus melupakan perbedaan dengan menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Mudah-mudahan polarisasi yang dewasa dalam arti kebebasan memilih dan beda memilih ini sifatnya sementara. Setelah pemilihan tidak ada lagi perbedaan, hormati keputusan," ujarnya.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, perubahan geopolitik dan geoatmosfer negara-negara di dunia saat ini terjadi sangat cepat. Bahkan akan semakin cepat lagi di masa mendatang. Kendati demikian Sultan memiliki keyakinan perubahan peradaban akan lari dan berada di Asia-Pasifik karena pusat pertumbuhan dunia memang di Asia dan Pasifik.

Ketua DPD IKAL Lemhannas DIY 2022-2027 Agus Sartono mengatakan, DPD IKAL Lemhannas DIY memandang sangat penting dan strategis, bagaimana memperbaiki literasi digital generasi muda, khususnya dalam upaya meningkatkan ketahanan nasional. **(Ria)-d**



KR-Franz Boedisukamanto

Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar menyerahkan Pataka kepada Prof Dr R Agus Sartono MBA pada Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus DPD IKAL Lemhannas DIY di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta.

KPK LELANG BARANG HASIL RAMPASAN

Milik Imam Nahrawi dan Nurdin Abdullah

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang barang hasil rampasan milik terpidana mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dan mantan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah. Lelang dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III.

"Pelaksanaan lelang barang rampasan Imam Nahrawi itu dilakukan Rabu (2/11) dengan batas akhir penawaran pukul 10.00 WIB waktu server (sesuai WIB)," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ipi Maryati Kuding di Jakarta, Kamis (20/10).

Imam Nahrawi adalah terpidana perkara suap terkait pengurusan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan penerimaan gratifikasi dari sejumlah

pihak. Adapun objek lelang, tiga bidang tanah dalam satu hamparan dengan total luas 1.178 meter persegi berlokasi di Jalan Manunggal II Kelurahan Ceger Kecamatan Cipayang Jakarta Timur.

Tanah tersebut juga dilengkapi bukti kepemilikan asli, yakni hak milik nomor 01254, akta jual beli yang dikeluarkan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Warman nomor 16/2015 dan akta jual beli yang dikeluarkan PPAT Zainal Almanar nomor 3717/2013 dengan harga limit Rp 8.538.906.000,00 dan peserta lelang diwajibkan memberikan uang jaminan Rp 1.800.000.000,00.

Adapun cara penawarannya secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (e-auction) dengan metode closed bidding dengan mengakses <https://www.lelang.go.id>. **(Ful)-f**

JAMIN KEAMANAN KTT G20

Panglima TNI Siapkan 14.000 Prajurit

JAKARTA (KR) - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa akan mengerahkan ribuan prajurit untuk memastikan keamanan para kepala negara dan delegasi yang akan mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, 15-16 November 2022 mendatang. Total lebih dari 18.000 personel gabungan yang akan terlibat dalam pengamanan KTT G20 nanti.

Panglima TNI menjelaskan, dari total 18.030 personel yang terlibat, TNI mendominasi dengan lebih dari 14.000 personel. Sisanya berasal dari Kepolisian (3.200 personel) dan institusi lain 492 personel. "Semuanya berada di bawah komando Panglima TNI," kata Jenderal Andika Perkasa dalam Jumpa Pers G20 Updates 'Dukungan Pengamanan KTT G20' secara virtual di Jakarta, Kamis (20/10).

Andika Perkasa menjelaskan, keseluruhan personel itu akan dibagi dalam beberapa satuan tugas, termasuk Satgas VVIP. Adapun Satgas VVIP yang disiapkan tidak hanya untuk 20 Kepala Negara Anggota G20, tetapi juga 42 kepala negara lainnya yang diperkirakan akan hadir di Bali.

Pengamanan untuk kepala negara dan seluruh tamu KTT G20 ini juga

melibatkan Satgas Laut dan Udara. Untuk Satgas Laut, TNI menurunkan kekuatan 12 KRI yang ditempatkan di sekeliling Pulau Bali, termasuk untuk pendampingan kapal-kapal militer dari negara-negara partisipan G20.

Sementara Satgas Udara, TNI mengerahkan pesawat tempur masing-masing dua F16 dan Sukhoi 27 serta Sukhoi 30. Turut pula dikerahkan total 13 helikopter dengan rincian enam helikopter Angkatan Udara, lima helikopter Angkatan Laut, dan dua helikopter Angkatan Darat.

TNI juga menyiapkan dua unit pesawat Hercules. Satu bertugas untuk kepentingan medis guna mengevakuasi pasien darurat. Satu lainnya akan bertugas sebagai angkutan jika diperlukan. Bersama itu juga disiagakan satu pesawat Boeing VIP sebagai tambahan, dan dua pesawat Boeing sebagai pengintai atau ISR.

Untuk menunjang operasional tersebut, ada 19 pangkalan udara yang disiapkan TNI. Pangkalan udara itu tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Kalimantan. "Kami sudah beberapa kali meninjau lokasi tempat acara. Dalam perkembangan selalu ada dinamika," kata Jenderal Andika Perkasa. **(Ati)-f**

TINGGI KREATIVITAS WARGA YOGYA

HKI Beri Perlindungan Hukum Karya Intelektual

WARGA Yogyakarta dikenal memiliki kreativitas yang tinggi di banyak bidang seperti kesenian, budaya, ekonomi kreatif, kuliner dan lainnya. Untuk melindungi kekayaan intelektual yang sangat banyak di Yogyakarta itu, maka perlu didaftarkan agar memberikan keuntungan secara berkelanjutan bagi pembuatnya.

Plh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kanwil Kemenkumham DIY, Mutia Farida SH MH menuturkan, kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Untuk menghasilkan sebuah produk tentu seseorang (pembuat) membutuhkan tenaga, waktu dan pikiran.

"Nah, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini berperan memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan karya intelektual, baik yang bersifat komunal maupun personal. Ini menjadi basis pengembangan ekonomi kreatif di DIY," terang Mutia dalam Podcast Rembag Kaistimewan bertema 'Mengenal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Seluk Beluknya'.

"Jadi kekayaan intelektual itu adalah aset yang tidak berwujud dan bisa dijadikan sebagai jaminan pembiayaan perbankan, biasanya ini kalau kekayaan intelektualnya sudah punya nama besar," lanjutnya.

Podcast Rembag Kaistimewan diselenggarakan oleh Paniradya Kaistimewan DIY di Gedung Paniradya Kaistimewan DIY, Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kepatihan Danurejan Yogyakarta, Kamis (20/10) dan disiarkan *live streaming* di channel YouTube Paniradya Kaistimewan DIY <https://youtube.com/c/PaniradyaKaistimewan>. Kegiatan podcast ini didanai dengan Dana Kaistimewaan.

Rembag Kaistimewan menghadirkan narasumber



KR-Istimewa

Podcast Rembag Kaistimewan bertema 'Mengenal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Seluk Beluknya'.

lain Nur Ikhwana Rahmanto SAnt MURP (Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan, Paniradya Kaistimewan DIY) dan Tri Sajiwo ST (Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Disperindag DIY) dipandu Ninda Fillasputri. Acara diemeriahkan special performance Jezz Gandhes dan S25 Entertainment.

Dijelaskan Mutia, bidang kekayaan intelektual itu cukup banyak dan bisa ditemui di sekeliling kita, misalnya batik, corak batik (bidang hak cipta), nama barang (bidang merek). Kemudian ada paten, rahasia dagang, dan masih banyak lagi. "Kekayaan intelektual di Yogya yang merupakan hasil olah pikir warga Yogya itu banyak sekali yang perlu diberikan perlindungan hukum yaitu HKI," tandasnya.

Menurut Mutia, untuk memberikan pemahaman terkait kekayaan intelektual kepada masyarakat, Kanwil Kemenkumham DIY terus melakukan upaya sosialisasi edukasi terutama ke pelaku UMKM. Tak ketinggalan edukasi ke pelajar sekolah karena mereka juga berkreatasi. "Upaya ini memberikan hasil yaitu capaian kinerja berupa pendaftaran kekayaan intelektual di DIY jumlahnya lebih tinggi dibanding daerah lain," katanya.

Mutia mengingatkan pentingnya orang yang punya produk untuk segera mendaftarkan kekayaan intelek-

tualnya. Jangan sampai cewa karena produk buatan-nya dipakai/diklaim oleh orang lain. Pasalnya banyak orang awam yang mendaf-tarkan merek tapi tidak tahu bagaimana perlindungannya. "Di situ lah pentingnya pembinaan-pembinaan ke-ayaan intelektual," tuturnya.

Tri Sajiwo mengatakan, untuk meningkatkan kekayaan intelektual terutama sektor UMKM, Balai Pengelo-laan Kekayaan Intelektual (BPKI) DIY memberikan layanan konsultasi soal kekayaan intelektual secara gratis. Selain itu program edukasi dan pengenalan HKI yang juga diperuntukkan bagi UMKM.

Menurutnya, hingga saat ini pihaknya telah melaksanakan program edukasi kekayaan intelektual untuk 60 angkatan (setiap angkatan 30 orang) bersinergi dengan beberapa pihak dan dinai dengan Danais. BPKI DIY juga menjalin kerja sama dengan praktisi HKI dan konsultan bisnis. "Karena setelah sebuah produk/ merek terdaftar sebagai HKI, maka harus dilanjutkan dengan branding produk dan lainnya untuk pengembangan bisnis," katanya.

Lebih lanjut Tri menga-takan, BPKI juga mempunyai program fasilitasi pendaf-taran HKI gratis. Tahun ini diperuntukkan bagi fasilitasi pendaftaran merek dengan kuota 450 (saat ini kuota sudah penuh), dan tahun depan fasilitasi tersebut akan

dibuka kembali dengan bidang yang lebih banyak, merek, hak cipta atau paten. "BPKI DIY posisinya hanya sebagai fasilitasi, karena untuk pendaftaran tetap di Kanwil Kemenkumham DIY," katanya.

Sementara itu, Nur Ikhwana Rahmanto mengatakan, salah satu tujuan Keisti-mewaan DIY adalah mewu-judkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat DIY. Untuk mewujudkan tujuan itu, maka ada Danais yang dialokasikan ke Dispe-rindag DIY yang digunakan salah satunya untuk membe-rikan fasilitasi pendaf-taran HKI, edukasi soal kekayaan intelektual, sehingga masya-rakat mengetahui dan bisa mengambil keuntungan dari itu (HKI).

Menurutnya, selain Dis-perindag DIY, juga ada alokasi Danais untuk Dinas Koperasi dan UKM DIY yang juga ditujukan untuk mendo-rong produk UMKM terdaf-tar sebagai HKI serta mening-katkan pemahaman masya-rakat DIY (pelaku UMKM) tentang kekayaan intelek-tual. "Pelaku ekonomi kreatif ini kadang berpikir hanya menghasilkan produk saja, tapi lupa untuk keberlanjutan dan keuntungan yang akan dia dapat dari kekayaan intelektual yang dia ciptakan. HKI ini salah satu cara agar orang-orang kreatif ini men-dapatkan keuntungan dari apa yang sudah mereka lakukan/hasilkan," ujarnya. **(Dev)**

BANYAK KORBAN MENINGGAL DI KANJURUHAN

Mahfud MD: Gas Air Mata Jadi Penyebab

JAKARTA (KR) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai gas air mata yang digunakan oleh aparat kepolisian menyebabkan 133 orang meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan, Malang. Sebab bukan kimianya yang menyebabkan, tetapi penembakannya yang menyebabkan orang panik kemudian berdesak-desakan dan mati.

Hal itu diungkapkan Mahfud MD yang juga Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan saat mengomentari hasil survei LSI, Kamis (20/10).

"Saya nggak peduli sekarang seberapa besar kandungan kimia yang mematikan (dalam gas air mata), itu tidak penting. Karena bukan kimianya yang menyebabkan, tetapi penembakannya yang menyebabkan orang panik kemudian berdesak-desakan dan mati," kata Mahfud.

Hasil survei Lembaga Survei Indo-

nesia (LSI) menunjukkan sebanyak 24,3 persen responden memilih Penyelenggara Liga dan 29,4 persen memilih aparat kepolisian harus bertanggung jawab insiden Kanjuruhan. "Aparat Kepolisian dan kemudian Penyelenggara Liga dinilai paling bertanggung jawab menurut sebagian besar responden," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan.

Responden memilih PSSI sebagai pihak yang harus bertanggung jawab sebesar 6,7 persen, TNI (2,6 persen), suporter (13,6 persen), semua pihak bertanggung jawab (5,9 persen), lainnya (0,8 persen), tidak tahu/ tidak jawab (16,7 persen).

Survei LSI ini dilakukan pada 6-10 Oktober 2022 dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 1.212 responden. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). RDD merupakan teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

"Margin of error" dalam survei ini sebesar sekitar 2,9 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Terkait hal tersebut, kata Mahfud, maka kepolisian dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) harus ikut bertanggungjawab. "Mungkin gas air matanya sendiri tidak menyebabkan kematian langsung, tetapi penyemprotan ke tempat-tempat tertentu menyebabkan orang panik, nafasnya sesak, lalu lari ke tempat yang sama, desak-desakan, mati. Jadi, penyebabnya ya gas air mata," jelasnya.

Mengenai rekomendasi dari TGIPF menjadi pertanyaan di tengah masyarakat, apakah ada gunanya atau tidak. "Karena begini, menyangkut dunia sepakbola, pengaturan, pengorganisasian dan lainnya itu sudah diatur oleh FIFA dan PSSI. Kita tidak boleh ikut campur ke situ, tetapi pemerintah sudah bicara dengan presiden FIFA akan bersama-sama melakukan transformasi," tuturnya. **(Sim)-f**

GANTIKAN JOKO SUYANTO

Tedy Alamsyah Ketua Umum DPP Perbarindo



KR-Istimewa

Joko Suyanto dan Tedy Alamsyah.

memilih Tedy sebagai Ketua. "Awalnya anggota mengharapakan Pak Joko Suyanto kembali menjadi Ketum yang disampaikan dalam acara Pra-Munas XI. Namun seminggu sebelum Munas XI, Pak Joko menyampaikan tidak mau lagi menjadi Ketum. Beliau ingin ada regenerasi. Kemudian, dalam Munas ini anggota Perbarindo mendorong saya untuk menggantikan Pak Joko dengan

berbagai alasan," ujar Tedy. Ketua Umum, Pengurus Harian DPP, dan Dewan Pengawas Perbarindo 2022-2026 dilantik Kamis (20/10), terdiri Ketua Dewan Pengawas Joko Suyanto dengan Anggota Awet Abadi, Sofia Nurkrisna Jati, T Jaya Tarigan dan Stevanus Yapto. Untuk Pengurus Harian DPP, Ketum Tedy Alamsyah, Waketum Riwandari Ju-niastuti, Sekjen Ascar Se-

tiyono, Wasekjen Ahmad Ropik dan Linda Sri Rejeki, Bendahara Umum Widhawati dan Wakil Jajang Herdiman, serta dilengkapi delapan ketua bidang.

Munas XI Perbarindo yang dibuka Menko Per-ekonomian Airlangga Hartarto ini mengusung tema 'Penguatan Peran BPR dan BPRS Sebagai Mitra UMKM Menuju Pemulihan dan Kebangkitan Ekonomi Nasional', dilengkapi Sarasehan Nasional, UMKM Expo, grand launching BPR e-Cash serta peluncuran empat buku sekaligus. Bahkan, salah satu buku berjudul 'Perempuan Tangguh: Sukses adalah Sebuah Perjalanan' mendapat piagam penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri), sebagai buku dengan perempuan penulis terbanyak (128 orang) yang bergerak di sektor perbankan. **(San)-d**